

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD)”, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep pemikiran yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka akan menjadi instrumen penting dalam menginterpretasikan temuan-temuan pada penelitian yang akan dilakukan nantinya. Tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related literature*) untuk menganalisis objek penelitian dan segala fenomena yang ada di dalamnya sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian yang sudah ditentukan, maka digunakan beberapa teori yang diambil dari berbagai literatur sebagai tinjauan Pustaka. Pemilihan dan penggunaan teori-teori yang relevan dengan tujuan dan sasaran penelitian akan dikelompokkan menjadi beberapa bagian dalam bab ini. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai pijakan pemahaman dalam melakukan analisis terhadap segala temuan yang didapat saat penelitian dilakukan.

Penggunaan teori-teori ini juga akan membantu peneliti saat merumuskan suatu kesimpulan setelah proses analisis dilakukan. Bahkan, peneliti dapat memberikan suatu rekomendasi yang bermanfaat tentang keabsahan teori-teori tersebut atau justru memberikan masukan tentang adanya teori-teori baru sebagai sebuah pengembangan dari teori yang ada sebelumnya.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertahanan Negara

Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat (1) menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Konsepsi pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu.

Kesemestaan bermakna melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan integral. Pertahanan negara yang bersifat semesta tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Sedangkan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah RI.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah RI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah RI dan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan pertahanan negara harus didudukkan pada tiga aspek fundamental yang menjadi tujuan pertahanan negara, yang mencakup aspek kedaulatan, keutuhan wilayah RI serta aspek keselamatan dan kehormatan bangsa Indonesia.

Tujuan dan kepentingan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara tidak sekadar bersifat fisik, yakni kedaulatan teritorial yang berhubungan dengan batas negara. Pertahanan negara juga berfungsi untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara. Dalam menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Setiap usaha untuk mengganti ideologi Pancasila akan berhadapan dengan instrumen pertahanan negara yang setiap saat siap sedia untuk membela dan mempertahankannya. Dalam menjaga sistem politik negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan negara yang stabil, demokratis, bersih, dan akuntabel, sebagai prasyarat yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional dengan baik dan efektif.

Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang demokratis. Nilai-nilai demokratis tersebut terangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bangsa Indonesia yang bernegara dalam wadah NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup serta bukan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan.

Tujuan dan kepentingan pertahanan negara juga diarahkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Pelaksanaannya didasarkan pada pandangan bangsa Indonesia yang menempatkan NKRI sebagai keputusan final yang harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Setiap usaha pemisahan diri atau yang bertujuan mengubah dan memecah-belah NKRI merupakan ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI dan menjadi ancaman yang berdimensi pertahanan. Separatisme merupakan bentuk ancaman pertahanan yang mengancam keutuhan wilayah NKRI, sehingga menjadi ancaman pertahanan yang utama. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa usaha separatisme dilakukan dalam dua pola gerakan, yakni gerakan separatisme tidak bersenjata yang dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter dan gerakan separatisme bersenjata yang menjadi ancaman militer.

Selanjutnya, tujuan dan kepentingan pertahanan negara dalam menjamin keselamatan bangsa, merupakan hal fundamental dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk ancaman. Menjamin keselamatan bangsa mencakup upaya-upaya pertahanan negara dalam menghadapi setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dimensi keselamatan bangsa juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan penanggulangan dampak bencana alam ataupun bencana buatan manusia dan kerusuhan sosial, mengatasi tindakan terorisme serta menegakkan keamanan di laut dan udara Indonesia, termasuk dari kejahatan lintas negara.

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah RI sebagai satu kesatuan pertahanan

diselenggarakan dalam fungsi pertahanan negara yang meliputi penangkalan, penindakan dan pemulihan.

- a. Fungsi penangkalan merupakan perwujudan usaha pertahanan dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Karakter penangkalan tidak bersifat pasif, akan tetapi aktif yang dilakukan dengan upaya pertahanan melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara, baik secara militer maupun nirmiliter. Fungsi penangkalan dilaksanakan dengan strategi penangkalan yang bertumpu pada instrumen penangkalan berupa instrumen politik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, teknologi, dan militer.

Dalam kerangka penangkalan, instrumen politik menyelenggarakan pembangunan sistem politik yang sehat dan kuat serta usaha-usaha diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara untuk mencegah dan meniadakan setiap potensi ancaman yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Instrumen ekonomi menyelenggarakan pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi yang jelas untuk mencapai pertumbuhan yang sehat dan cukup tinggi bagi terwujudnya pencapaian tujuan nasional yakni tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Instrumen psikologis yang diemban oleh semua komponen bangsa, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, mewujudkan upaya penangkalan melalui usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menumbuhkembangkan nasionalisme, patriotisme, dan heroisme bangsa disegala bidang.

Instrumen sosial menyelenggarakan pembangunan dan pendayagunaan sistem nilai serta segenap pranata sosial dalam mewujudkan kehidupan dan interaksi sosial masyarakat/warganegara yang harmonis serta saling menghargai. Instrumen teknologi menyelenggarakan usaha untuk memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan industri nasional yang kuat serta industri pertahanan dalam negeri yang berdaya saing. Instrumen militer, yakni TNI, sebagai Komponen Utama pertahanan negara menyelenggarakan usaha-usaha membangun dan membina kekuatan dan kemampuan dengan mengembangkan strategi militer yang memiliki efek daya tangkal yang tinggi serta profesional dalam melaksanakan setiap tugas operasi, baik OMP maupun OMSP.

- b. Fungsi penindakan, merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara dari seluruh kekuatan nasional, baik secara militer maupun nirmiliter, untuk menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Fungsi penindakan dilaksanakan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan negara dalam sistem pertahanan semesta untuk melakukan tindakan preemptive, penanggulangan, atau perlawanan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis ancaman serta tingkat risiko yang ditimbulkan/dihadapi.

Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan didukung oleh seluruh kekuatan nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam susunan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Dalam menghadapi ancaman militer yang berasal dari luar, penyelenggaraan fungsi penindakan disesuaikan dengan bentuk ancaman untuk menentukan jenis

tindakan yang diambil serta kekuatan pertahanan yang digunakan. Ancaman militer berupa agresi atau invasi dihadapi dengan pendekatan perang, dan bagi Indonesia penyelenggaraan perang dilaksanakan secara total dalam wujud perang semesta.

Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Penindakan terhadap ancaman nonmiliter dilakukan dengan pendekatan fungsional oleh lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan berdasarkan jenis dan sifat ancaman. Fungsi penindakan diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah penyelamatan dengan mengerahkan segala kemampuan bangsa.

Bentuk-bentuk penindakan terhadap ancaman yang bersumber dari dalam negeri disesuaikan dengan jenis ancaman dan tingkat risiko yang ditimbulkan, serta dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam negara demokrasi.

Tindakan preemptive merupakan bentuk penindakan yang dilakukan terhadap pihak lawan atau terhadap ancaman yang bersifat militer ataupun nonmiliter, yang nyata-nyata akan menyerang Indonesia. Tindakan preemptive dilaksanakan melalui pengerahan kekuatan pertahanan untuk mendahului pihak lawan yang sedang dalam persiapan untuk menyerang Indonesia. Tindakan preemptive dilaksanakan di wilayah pihak lawan atau di dalam perjalanan sebelum memasuki wilayah Indonesia. Tindakan preemptive juga diterapkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan sifat ancaman.

Tindakan perlawanan merupakan bentuk penindakan terhadap pihak lawan yang sedang menyerang Indonesia atau telah menguasai sebagian atau seluruh wilayah Indonesia dengan cara mengerahkan seluruh kekuatan negara, baik secara militer maupun nirmiliter. Tindakan perlawanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA) melalui pengerahan kekuatan pertahanan yang berintikan TNI didukung oleh segenap kekuatan bangsa dalam susunan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

- c. Fungsi pemulihan, memiliki cakupan ke dalam dan ke luar. Pada lingkup ke dalam, fungsi pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara nirmiliter dan militer untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan atau serangan separatis, konflik vertikal atau konflik horizontal, huru-hara, serangan teroris, atau bencana alam maupun akibat ancaman nonmiliter. TNI bersama dengan instansi pemerintah lainnya serta seluruh warga masyarakat melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud pertahanan semesta yang utuh. Pada lingkup ke luar, fungsi pemulihan diwujudkan melalui pelibatan unsur kekuatan pertahanan dalam mengambil bagian mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Secara militer, hal ini diwujudkan antara lain dalam bentuk pengiriman pasukan pemelihara perdamaian atau pengamat pemelihara perdamaian. Secara nirmiliter hal ini diwujudkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam berbagai usaha, antara lain melalui keanggotaan PBB dan organisasi internasional/regional, serta dalam memfasilitasi usaha-usaha internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.

2.1.2 Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Optimalisasi artinya paling menguntungkan, tertinggi, terbaik (Depdiknas, 2001). Optimal adalah berusaha untuk memaksimalkan sesuatu yang diinginkan (Sisdijatmo, 1983). Sehingga Optimalisasi merupakan proses, cara, atau perbuatan mengoptimalkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling menguntungkan, dan paling tinggi. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Istilah optimalisasi sering digunakan dalam teori manajemen untuk meningkatkan kualitas suatu proses kegiatan atau suatu produk. Yusuf Shofie (2013) memaknai sebagai suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Sedangkan Wahyuningsih (2012:12) mengartikan optimalisasi sebagai proses mengoptimalkan sesuatu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi mengandung arti sebagai upaya menuju proses dan hasil yang terbaik.

Dalam konteks penelitian ini, optimalisasi merupakan kondisi terbaik yang diharapkan dapat dicapai oleh komponen cadangan yang melalui serangkaian proses mulai dari tahap seleksi, pembentukan, pembinaan dan penggunaan sehingga peran dari Komponen Cadangan berada di titik maksimal.

2.1.3 Teori Peran

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E. St. Harahap Dkk, 2007). Menurut Sardjono Soekanto (2002), Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai hak dan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran memiliki dua dimensi peran, yaitu kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan tindakan yang diharapkan akan dilaksanakan oleh seseorang (kelompok atau lembaga). Sedangkan, hak merupakan tindakan atau respon orang lain. Konsep peran berkaitan dengan konsep status. Dalam hal ini, status hanya menunjuk pada prestise yang terdapat pada seseorang sehingga peran sebagai status merupakan satuan struktural yang paling mendasar sebagai syarat fungsional yang harus dipenuhi (Sofyan Cholid, 2009).

Dalam Teori Peran (*Role theory*) menurut Bruce J. Cohen (1992) peran memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain tentang peran dikemukakan oleh Gross, Mason dan A.W McEachern sebagaimana dikutip oleh David Berry yang mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang menduduki kedudukan sosial tertentu (Berry, 1983). Menurut Kozier Barbara, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumber daya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya.

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.

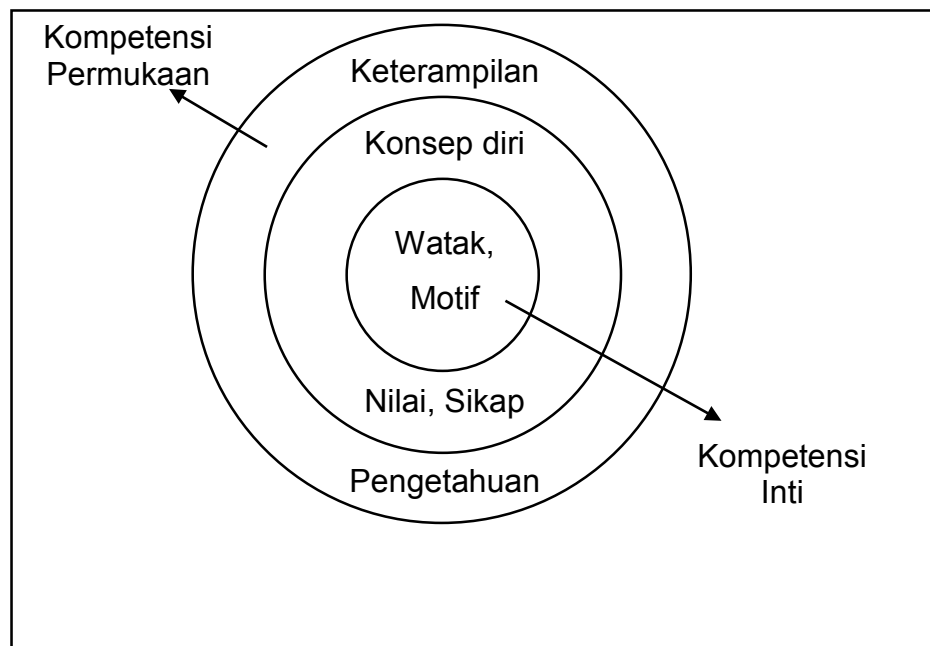
Dari beberapa pengertian tersebut peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan, perilaku yang dilaksanakan oleh lembaga yang berada dalam sistem sosial. Di dalam kedudukan sosial tersebut terdapat tugas-tugas yang sebelumnya telah disusun berdasarkan harapan-harapan yang diinginkan, sehingga apabila dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak sesuai dengan harapan, maka orang ataupun lembaga yang menjalankan peran dapat dikatakan belum berhasil menjalankan perannya dengan baik.

Dengan demikian pengertian peran dalam penelitian ini merujuk pada penjelasan peran yang dikemukakan oleh Sardjono Soekanto yaitu peran sebagai aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh Komponen Cadangan.

Sehingga optimalisasi peran Angkatan Darat dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai proses, cara dan upaya untuk memaksimalkan peran Komponen Cadangan matra darat terhadap pertahanan negara dalam kondisi damai dan perang.

2.1.4 Teori Kompetensi

Spencer dan Spencer dalam bukunya *Competence at Work* yang dikutip dari Tippe (2012 : 38), mengemukakan bahwa kompetensi individu adalah karakteristik dasar seorang pekerja yang menggunakan kepribadiannya yang paling dalam dan dapat memengaruhi perilakunya ketika menghadapi pekerjaan, yang akhirnya berpengaruh pada kemampuannya untuk menghasilkan prestasi kerja. Kompetensi ini terbentuk dari lima karakteristik: watak, motif, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi keterampilan dan pengetahuan cenderung dapat dilihat karena berada di permukaan. Kedua kompetensi ini relatif mudah dikembangkan, misalnya melalui pengalaman atau pelatihan. Kompetensi konsep diri, watak, dan motif bersifat lebih sembunyi, lebih dalam, dan berperan sebagai sumber kepribadian, lebih sulit dikembangkan. Model Kompetensi Sentral digambarkan sbagai berikut:



Gambar 2. Model Kompetensi Sentral

Sumber: Human Capital Management 2012

Kompetensi berkaitan erat dengan profesionalisme sesuai pandangan Huntington (1972:8-10) yang menjelaskan profesional adalah kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya dengan kriteria: *Expertise* atau keahlian dalam suatu bidang tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan kemudian dikembangkan melalui pengalaman; *responsibility* atau rasa tanggung jawab untuk menggunakan keahlian yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas; dan *corporateness* atau kerja sama sebagai bagian dari kesatuan perasaan organik dan kesadaran diantara mereka sebagai kelompok orang awam yang membedakan dari kelompok sosial.

2.1.5 Profesionalisme

Istilah profesionalisme berasal dari kata profesi yang berasal dari istilah *profession* (bahasa Inggris), dimana dalam Webster Dictionary, kata *profession* adalah berasal dari kata *profess*, dalam bahasa Yunani berarti ikrar. Kata *profes* berarti pengikrar laki-laki, *professe* pengikrar perempuan, *Professed* berarti rahib atau biarawati yang sudah mengucapkan kaul. Selanjutnya dari kata *profess* timbul kata bentukan, *profession* yang didalam bahasa Latin *professio*, yang memiliki beberapa arti (Muhadjir Effendy, 2009), antara lain:

- a. *An occupation, not purely commercial, to which one devotes oneself.* (suatu Pekerjaan yang tidak murni komersial, dimana seseorang mencurahkan seluruh dirinya).
- b. *A calling in which one profess to have acquired some special knowledge used by way either of instructing, guiding, or advising others of serving them in some art; as profession of arms, profession of teaching, profession of chemist.* (Suatu panggilan dalam mana seseorang berikrar untuk menguasai pengetahuan-pengetahuan khusus melalui pelatihan, pembimbingan, atau kepenasehatan yang ia abdikan bagi orang lain dalam beberapa bidang kiat; misalnya profesi militer, profesi guru, profesi ahli kimia dan sebagainya).

Selain itu kata bentukan berikutnya adalah *professionalism* (Muhadjir Effendy, 2009:36) antara lain berarti:

- a. *Conduct, aims, qualities, etc. characteristic of, peculiar to, a profession or professional man* (tingkah laku, tujuan, sifat-sifat; karakteristik mengenai keistimewaan suatu profesi; atau manusia professional).

- b. *The characteristics, standards or methods of professionals* (karakteristik, standar atau metode profesional).

Berdasarkan arti dari asal muasal istilah profesi, maka Muhadjir Effendy (2009: 37) merumuskan pengertian profesionalisme adalah standar yang dikenakan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan dengan lebih dilandasi oleh keyakinan akan adanya nilai-nilai kebenaran, kehormatan, kecintaan dan keterpanggilan di dalam pekerjaan itu; baik dalam hal menguasai keahlian yang diperlukan maupun pelayanan atas nama pekerjaan itu kepada orang lain, dari pada sekedar, atau semata-mata untuk memperoleh bayaran.

Sementara itu dari kalangan para ahli lain, dalam hal ini Samuel P. Huntington (2003:8) mengajukan tiga prasyarat profesionalisme yaitu adanya keahlian (*expertise*), tanggungjawab sosial (*social responsibility*), dan adanya organisasi kesejawatan yang mengikat (*corporateness*). Kemudian Morris Janowitz sebagaimana dikutip oleh Segal dan Schwartz, mengajukan empat sifat yaitu sebagai suatu keahlian yang sangat spesifik yang diperoleh melalui latihan yang intensif, adanya standar etika dan kinerja, adanya rasa identitas kelompok, dan adanya sistem administrasi internal (*special skill acquired through intensive training, standards of ethics and performance, a sense of group identity, system of internal administration*).

Berdasarkan pengertian istilah serta pendapat Huntington dan Janowitz tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya keahlian yang spesifik adalah bukan satu-satunya kriteria yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Memang kriteria itu mutlak karena berkenaan dengan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan, namun ada kriteria yang tidak kalah penting adalah bahwa seorang profesional harus memiliki tanggungjawab sosial, memiliki standar etika dan kinerja yang secara aksiologis sebagai rambu-rambu yang memberi batas dan arah mengenai untuk apa pekerjaan itu dilaksanakan,

dan bilamana pekerjaan itu harus, boleh, atau tidak boleh dilakukan (Muhadjir Effendy, 2009:37).

2.1.6 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Hakikatnya manajemen sumber daya manusia sangat berbeda dibandingkan dengan manajemen sumber daya alam, dimana manajemen sumber daya manusia sangat ditentukan oleh sifat SDM itu sendiri, yang selalu berkembang (dinamis) baik jumlah maupun mutunya. Sedangkan sumber daya alam jumlah absolutnya tidak berkembang. SDM meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota dalam organisasi, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Manusia sebagai SDM keberadaanya sangat penting dalam organisasi profit atau organisasi non profit, karena SDM menunjang organisasi melalui karya, bakat, kreativitas, dorongan dan peran nyata seperti yang dapat dilihat dalam setiap organisasi. Tanpa adanya unsur manusia dalam organisasi, tidak mungkin organisasi tersebut dapat bergerak dan berjalan menuju yang diinginkan.

Pengertian manajemen berasal bahasa Inggris *management* yang artinya "mengatur atau mengelola". Sedangkan manajemen sumber daya manusia mempunyai pengertian suatu ilmu yang mengatur atau mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) sebagai bagian dari bidang manajemen memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Tidak seperti bidang lainnya, manajemen SDM memiliki cakupan permasalahan yang sangat kompleks.

Beberapa pendapat para ahli manajemen mengenai pengertian MSDM antara lain:

- a. Menurut Tunas, B (2007, p.2), manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang mencakup evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia, mendapatkan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan itu, dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang penting tersebut dengan cara memberikan insentif dan penugasan yang tepat, agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi di mana sumber daya Manusia (SDM) itu berada.
- b. Menurut A. Sihotang (2006, P.10), manajemen sumber daya manusia adalah keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan seleksi, pelatihan, penempatan, pemberian kompensasi, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia (SDM) untuk tercapainya berbagai tujuan individu, masyarakat, pelanggan pemerintah dan organisasi yang bersangkutan.
- c. Menurut Efendi Hariandja, M.T. (2002, P.3), manajemen sumber daya manusia adalah keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi MSDM meliputi:

- a. Perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan.
- b. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan

pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi.

- c. Pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
- d. Pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
- e. Pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- f. Pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang dan barang kepada karyawan sebagai imbalan balas jasa yang diberikan kepada perusahaan.
- h. Pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
- i. Pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.
- j. Kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
- k. Pemberhentian. Pemberhentian adalah putusya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa MSDM merupakan kegiatan pengelolaan dan pengaturan personel mulai dari perencanaan MSDM, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan dan pengembangan tenaga kerja, hingga pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sampai saat ini belum ada penelitian yang dilaksanakan secara komprehensif terkait analisis Pembentukan Komponen Cadangan sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara (studi kasus: konsep pembentukan Komcad pada matra TNI AD). Namun demikian, terdapat beberapa referensi berupa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Muradi (2013) artikel jurnal dengan judul: Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Peneliti mengkaji mengenai bagaimana tentara cadangan, organisasi komponen didirikan, bagaimana komposisi dan jumlah serta distribusi personel Komponen Cadangan Angkatan Darat serta membahas kemungkinan kerja sama antara Angkatan Darat dan Pemerintah Daerah dalam proses perekrutan, pemeliharaan dan menyebarkan Komponen Cadangan Angkatan Darat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah ruang lingkup kajian yang sama yaitu pada Komcad matra darat. Perbedaannya terletak pada fokus/objek kajian yaitu pada komposisi organisasi Komcad matra darat sedangkan penelitian

yang akan dilakukan yaitu menganalisa dan mengoptimalkan sistem pembentukan, pembinaan dan penggunaan dari Komponen Cadangan matra darat.

- b. Raden Mas Jerry Irawan (2018) artikel jurnal dengan judul: Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer. Peneliti mengkaji mengenai bagaimana Komponen Cadangan , sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara, menghadapi ancaman nir-militer di masa depan. Metode penelitian menggunakan studi pustaka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah adanya fokus kajian pada proses penggunaan Komponen Cadangan selain untuk menghadapi ancaman militer juga dapat digunakan untuk menghadapi ancaman nir militer. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus/objek kajian yaitu upaya memanfaatkan kekuatan Komcad dalam menghadapi ancaman nir militer sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisa dan mengoptimalkan sistem pembentukan, pembinaan dan penggunaan dari Komponen Cadangan matra darat sehingga didapatkan peran yang maksimal.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti dan Tahun Publikasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat	Muradi (2013)	studi pustaka	Peneliti mengkaji mengenai bagaimana tentara cadangan, organisasi komponen didirikan, bagaimana komposisi dan jumlah serta distribusi personel Komponen Cadangan Angkatan Darat serta membahas kemungkinan kerja sama antara Angkatan Darat dan Pemerintah Daerah dalam proses perekrutan, pemeliharaan dan menyebarkan Komponen Cadangan Angkatan Darat.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah ruang lingkup kajian yang sama yaitu pada Komcad matra darat. Perbedaannya terletak pada fokus/objek kajian yaitu pada komposisi organisasi Komcad matra darat sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisa sistem pembinaan dari Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat.
2.	Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara	Raden Mas Jerry Irawan (2018)	studi pustaka	Peneliti mengkaji mengenai bagaimana Komponen Cadangan , sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara,	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah adanya fokus kajian pada proses penggunaan

	Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer			menghadapi ancaman nir-militer di masa depan.	Komponen Cadangan selain untuk menghadapi ancaman militer juga dapat digunakan untuk menghadapi ancaman nir militer. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus/objek kajian yaitu upaya memanfaatkan kekuatan Komcad dalam menghadapi ancaman nir militer sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisa sistem pembinaan dari Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat.
--	---	--	--	---	--

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu proses berpikir secara logis yang akan menguraikan masalah yang hendak diangkat dihadapkan pada berbagai hal diantara penyebab terjadinya permasalahan untuk menemukan akar persoalan; faktor-faktor yang berpengaruh baik bersifat positif maupun negatif, teori-teori maupun konsep-konsep yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dihadapkan pada ketentuan yang harus dipatuhi untuk dapat menemukan sebuah kesimpulan dan akhirnya tercapai sasaran yang hendak dicapai. Dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah analisis Pembentukan Komponen Cadangan sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara, maka konsep berpikir yang dikemukakan diawali dengan menemukan kerangka proses sistem pembinaan personel dari Komponen Cadangan matra darat menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Langkah berikutnya adalah menguraikan dan menganalisis sistem pembinaan personel Komponen Cadangan matra darat berupa aspek penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan untuk dapat mengoptimalkan peran Angkatan Darat. Optimalisasi peran tersebutlah yang menjadi output dari penelitian ini. Selanjutnya ilustrasi gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka Berpikir

